EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA JAYAPURA (STUDI KASUS STAGNASI KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN)

Jeremi Williams Ayomi
NPP. 33.1123
Program Studi Keuangan Publik
Email: jeremiayomi01@gmail.com
Pembimbing Skripsi: Dr. Ira Meiyenti, S.IP., M.Si.
Email: irameiyenti@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement: *The contribution of restaurant tax to Local Own-Source Revenue (PAD) in Jayapura City has remained stagnant at approximately ±21% during the 2020–2024 period, despite the continuous growth of café businesses and the relatively high level of taxpayer compliance. This condition indicates a gap between the growth of culinary businesses and the expected increase in restaurant tax contribution to PAD. Furthermore, studies specifically examining the phenomenon of stagnant restaurant tax contribution amid business growth and high tax compliance remain limited.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the effectiveness of restaurant tax management in increasing Local Own-Source Revenue (PAD) in Jayapura City based on the phenomenon of stagnant restaurant tax contribution.* ***Method:*** *This study employed a qualitative research method with a descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, observations, documentation, and literature studies. The analysis utilized Richard M. Steers' Organizational Effectiveness Theory, which consists of goal attainment, integration, and adaptation dimensions. Research informants included officials of the Regional Revenue Agency of Jayapura City and restaurant/café business owners.* ***Results:*** *The findings indicate that restaurant tax management in Jayapura City has been administratively effective, as reflected in the achievement and even surpassing of annual revenue targets. However, the contribution of restaurant tax to PAD has remained stagnant at around ±21%. Several obstacles were identified, including suboptimal supervision, inaccurate taxpayer data, limited utilization of digital technology, and non-compliance in reporting business turnover.* ***Conclusion:*** *Restaurant tax management in Jayapura City has been effective in terms of achieving revenue targets but has not yet been optimal in increasing the contribution of restaurant tax to PAD. Therefore, strengthening digital-based supervision systems, improving taxpayer database accuracy, optimizing technology utilization, and enhancing human resource capacity are necessary to support sustainable growth in restaurant tax contribution.*

Keywords: *effectiveness; restaurant tax; local own-source revenue; tax compliance.*

ABSTRAK

Permasalahan: Kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura menunjukkan kondisi yang cenderung stagnan pada kisaran ±21% selama periode 2020–2024, meskipun jumlah usaha café terus meningkat dan realisasi penerimaan pajak restoran mampu mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan usaha kuliner dan tingkat kepatuhan wajib pajak dengan peningkatan kontribusi

pajak restoran terhadap PAD. Selain itu, penelitian mengenai fenomena stagnasi kontribusi pajak restoran di tengah pertumbuhan usaha café dan tingginya kepatuhan pajak daerah masih relatif terbatas. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura berdasarkan fenomena stagnasi kontribusi pajak restoran. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan teori efektivitas organisasi Richard M. Steers yang meliputi dimensi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Informan penelitian terdiri atas aparatur Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura dan pelaku usaha restoran/café. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pajak restoran di Kota Jayapura secara administratif telah berjalan cukup efektif yang ditunjukkan oleh realisasi penerimaan pajak restoran yang mampu mencapai bahkan melampaui target penerimaan daerah. Namun demikian, kontribusi pajak restoran terhadap PAD masih stagnan pada kisaran ±21%. Hambatan yang ditemukan meliputi belum optimalnya pengawasan, rendahnya akurasi data wajib pajak, keterbatasan pemanfaatan teknologi digital, serta masih adanya ketidakpatuhan dalam pelaporan omzet usaha. **Kesimpulan:** Pengelolaan pajak restoran di Kota Jayapura telah berjalan efektif dari aspek pencapaian target penerimaan, namun belum optimal dalam meningkatkan kontribusi pajak restoran terhadap PAD. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan berbasis digital, peningkatan kualitas data wajib pajak, optimalisasi pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan kontribusi pajak restoran secara berkelanjutan.

Kata Kunci: efektivitas; pajak restoran; Pendapatan Asli Daerah; kepatuhan pajak.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Jayapura merupakan ibukota Provinsi Papua yang memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan aktivitas ekonomi di wilayah timur Indonesia. Sebagai kota transit dan gerbang perdagangan lintas batas dengan Papua Nugini, Kota Jayapura memiliki potensi ekonomi yang cukup besar dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, pasca pemekaran wilayah Papua yang melahirkan beberapa provinsi baru, terjadi penurunan kapasitas fiskal daerah sehingga pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak daerah. Oleh karena itu, efektivitas pemungutan pajak daerah bukan hanya soal administratif, tetapi juga menjadi kunci dalam menjaga stabilitas finansial daerah dan memastikan kesejahteraan masyarakat tetap meningkat di tengah perubahan struktur wilayah dan ekonomi (Lamba dkk., 2024: 40-46). Dalam perspektif pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi penerimaan pajak daerah merupakan instrumen penting untuk memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Akbar (2013b) menjelaskan bahwa kemandirian fiskal daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan secara efektif dan efisien. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah yang baik harus didukung oleh sistem administrasi dan akuntabilitas yang memadai agar mampu menghasilkan penerimaan daerah yang optimal (Akbar, 2013a). Dalam konteks perpajakan modern, efektivitas penerimaan pajak tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah mencapai target penerimaan, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dan kualitas tata kelola administrasi perpajakan (Alm & Torgler, 2011; Kirchler et al., 2008).

Salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD adalah pajak restoran. Perkembangan jumlah café dan usaha kuliner di Kota Jayapura mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama tahun 2020–2024. Fenomena berkembangnya usaha café menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat perkotaan yang dapat menjadi basis penerimaan pajak daerah. . Pertambahan jumlah penduduk tersebut diiringi dengan meningkatnya kebutuhan akan layanan publik, infrastruktur, serta ruang-ruang produktif bagi masyarakat (Tappi, 2021: 16-24). Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Jayapura, jumlah café mengalami peningkatan dari 60 unit pada tahun 2020 menjadi 104 unit pada tahun 2024. Selain itu, tingkat kepatuhan pajak daerah Kota Jayapura juga tergolong tinggi karena realisasi penerimaan pajak daerah setiap tahun selalu mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Pertumbuhan sektor kuliner dan restoran pada dasarnya merupakan peluang strategis bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian Aryanisila dan Hardiyanto (2024) menunjukkan bahwa pajak restoran memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD apabila didukung oleh sistem pengawasan dan administrasi perpajakan yang efektif. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Djawang (2023) yang menyatakan bahwa kontribusi pajak restoran terhadap PAD dapat meningkat apabila pemerintah daerah mampu mengoptimalkan pengawasan, pelayanan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

Namun demikian, kondisi tersebut tidak sejalan dengan kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Jayapura yang cenderung stagnan pada kisaran 21% selama lima tahun terakhir. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara peningkatan jumlah usaha café dan tingkat kepatuhan pajak dengan peningkatan kontribusi pajak restoran terhadap PAD. Secara teoritis, peningkatan jumlah usaha restoran dan tingginya kepatuhan pajak seharusnya mampu meningkatkan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan daerah. Kondisi stagnasi kontribusi pajak restoran tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas pengelolaan pajak restoran belum sepenuhnya optimal dalam mendukung peningkatan PAD Kota Jayapura. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan pajak restoran serta mengidentifikasi faktor penghambat dan upaya kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan kontribusi pajak restoran terhadap PAD.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Penelitian ini berfokus pada fenomena stagnasi kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Jayapura di tengah meningkatnya jumlah usaha café dan tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak. Secara empiris, realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Jayapura terus mengalami peningkatan dan bahkan mampu melampaui target penerimaan daerah. Akan tetapi, kontribusi pajak restoran terhadap PAD justru tidak mengalami peningkatan yang signifikan dan cenderung stagnan pada kisaran ±21% selama periode 2020–2024. Menurut (Vuković, dkk., 2022: 16) jika sebuah perusahaan tidak tumbuh sesuai potensi atau "tingkat pertumbuhan yang berkelanjutan", maka akan mengalami stagnasi. Dalam konteks laporan keuangan, stagnasi berarti kinerja keuangan yang "mentok" atau tidak berkembang, yang bisa menjadi sinyal bahwa perusahaan tidak memanfaatkan sumber daya atau tidak bersaing secara optimal.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan pajak daerah dipengaruhi oleh kualitas administrasi perpajakan, pengawasan, pemanfaatan teknologi, dan tingkat kepatuhan wajib pajak (Nooraini & Syarifudin, 2018; Maabuat et al., 2022; Aryanisila & Hardiyanto, 2024). Pada tingkat internasional, penelitian Alm dan Torgler (2011), Kirchler et al. (2008), serta Mascagni (2018) menegaskan bahwa keberhasilan penerimaan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh aspek regulasi, tetapi juga oleh kepatuhan sukarela, moral pajak, dan efektivitas administrasi perpajakan. Namun demikian, masih sangat terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji fenomena stagnasi

kontribusi pajak restoran terhadap PAD di tengah meningkatnya jumlah usaha café dan tingginya realisasi penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan penelitian tersebut dengan menganalisis efektivitas pengelolaan pajak restoran berdasarkan fenomena stagnasi kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Jayapura.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena peningkatan PAD merupakan salah satu indikator utama kemandirian fiskal daerah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Kota Jayapura sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi di Papua membutuhkan kapasitas fiskal yang kuat agar mampu membiayai pembangunan daerah secara berkelanjutan. Apabila fenomena stagnasi kontribusi pajak restoran tidak segera diatasi, maka pemerintah daerah akan mengalami kesulitan dalam mengoptimalkan potensi penerimaan pajak daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga berisiko semakin bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat sehingga mengurangi fleksibilitas fiskal daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas pengelolaan pajak restoran di Kota Jayapura sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan perpajakan daerah yang lebih efektif, adaptif, dan berbasis teknologi.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini juga didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang relevan terkait efektivitas pengelolaan pajak daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Djawang, 2023) meneliti efektivitas dan kontribusi pajak restoran dalam meningkatkan PAD Kota Kupang menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak restoran memiliki kontribusi signifikan terhadap PAD, namun pengawasan dan kepatuhan wajib pajak masih menjadi kendala utama. Penelitian ini relevan karena sama-sama membahas efektivitas pajak restoran terhadap PAD daerah. (Hanifah, 2021) meneliti pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD sehingga optimalisasi penerimaan pajak daerah menjadi faktor penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Penelitian (Aryanisila & Hardiyanto, 2024) menjelaskan bahwa pajak restoran memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD terutama pada daerah yang mengalami pertumbuhan sektor kuliner dan pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor restoran dapat menjadi sumber penerimaan strategis apabila dikelola secara efektif melalui pengawasan dan digitalisasi sistem perpajakan. (Rendhika Adhiyatama, Sadariah Banurea, 2022) meneliti pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Badung, Bali. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pajak daerah yang optimal berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kemampuan fiskal pemerintah daerah.

(Abdullatif et al., 2025) meneliti pengelolaan PAD di Kabupaten Gorontalo menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam optimalisasi PAD terletak pada pengawasan pajak yang belum optimal serta rendahnya validitas data wajib pajak sehingga diperlukan pembaruan sistem administrasi perpajakan daerah. Selain penelitian umum mengenai pajak daerah, terdapat pula beberapa penelitian dari akademisi dan dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang relevan dengan penelitian ini. (Nooraini & Syarifudin, 2018) dalam penelitian berjudul *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli*

Daerah di Kota Batu menjelaskan bahwa efektivitas pajak daerah memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan PAD, namun masih diperlukan optimalisasi pengawasan dan intensifikasi pajak daerah.

(Maabuat et al., 2022) dalam penelitian *Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Utara* menjelaskan bahwa strategi penguatan pelayanan pajak dan peningkatan kualitas sarana-prasarana perpajakan menjadi faktor penting dalam optimalisasi penerimaan daerah. (Kurniati, 2018), akademisi IPDN, meneliti implementasi kebijakan pemberian keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kalimantan Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penerimaan PAD telah mencapai target, masih ditemukan permasalahan berupa lemahnya sistem pendataan, rendahnya kepatuhan wajib pajak, dan belum optimalnya kualitas pelayanan perpajakan daerah. (Azwin et al., 2025) dalam penelitian *Studi Kuantitatif tentang Efektivitas Program Pemutihan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Ambon* menjelaskan bahwa program pemutihan pajak mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah sebesar 16,2% setelah implementasi program dilakukan. Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya kualitas informasi dan sosialisasi perpajakan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

(Budgeting & Ramadan, 2018) dalam penelitian *Pengaruh Implementasi Kebijakan Fiskal dan Kapasitas Kelembagaan terhadap Kinerja Keuangan* menjelaskan bahwa implementasi kebijakan fiskal yang baik serta kapasitas kelembagaan yang kuat berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian tersebut menegaskan pentingnya penguatan sistem administrasi dan tata kelola fiskal dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi pengelolaan pajak daerah, penguatan pengawasan, pemanfaatan teknologi digital, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Namun demikian, masih terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji fenomena stagnasi kontribusi pajak restoran terhadap PAD di tengah meningkatnya jumlah usaha café dan tingginya tingkat kepatuhan pajak daerah, khususnya di Kota Jayapura. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dan relevansi untuk dilakukan.

Selain penelitian nasional, beberapa penelitian internasional juga menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan pajak sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola administrasi perpajakan. Alm, Martinez-Vazquez, dan McClellan (2016) menjelaskan bahwa lemahnya pengawasan dan praktik administrasi yang tidak optimal dapat mengurangi potensi penerimaan pajak. Gangl et al. (2015) menekankan bahwa hubungan yang baik antara otoritas pajak dan wajib pajak mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan. Sementara itu, Lisi (2015) menunjukkan bahwa moral pajak dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam optimalisasi penerimaan pajak. Temuan-temuan tersebut memperkuat pentingnya pengelolaan pajak restoran yang efektif dalam mendukung peningkatan PAD daerah.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menganalisis efektivitas pengelolaan pajak restoran berdasarkan fenomena stagnasi kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Jayapura. Penelitian ini tidak hanya menilai efektivitas dari sisi pencapaian target penerimaan pajak, tetapi juga mengkaji sejauh mana pengelolaan pajak restoran mampu meningkatkan kontribusi fiskal daerah secara substantif. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori efektivitas organisasi (Steers, 2008) yang

meliputi dimensi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi untuk menganalisis pengelolaan pajak restoran di Kota Jayapura.

1.6 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura berdasarkan fenomena stagnasi kontribusi pajak restoran.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami fenomena efektivitas pengelolaan pajak restoran secara mendalam berdasarkan kondisi empiris yang terjadi di Kota Jayapura. Analisis penelitian menggunakan teori efektivitas organisasi (Steers, 2008) yang meliputi dimensi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Dimensi pencapaian tujuan digunakan untuk melihat keberhasilan pengelolaan pajak restoran dalam mencapai target penerimaan pajak daerah. Dimensi integrasi digunakan untuk menganalisis koordinasi dan hubungan antara pemerintah daerah dengan wajib pajak. Sementara dimensi adaptasi digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam menyesuaikan sistem pengelolaan pajak terhadap perkembangan kondisi ekonomi dan teknologi. Pemilihan pendekatan kualitatif deskriptif mengacu pada prinsip metodologi penelitian sosial yang menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dan administrasi publik melalui interpretasi data empiris secara sistematis (Ardieansyah et al., 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari aparatur Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura serta pelaku usaha restoran/café yang berkaitan langsung dengan pengelolaan pajak restoran. Teknik analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura selama tahun 2025 sampai dengan 2026.

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura sebagai lokus utama penelitian, serta pada beberapa usaha restoran dan café yang terdaftar sebagai wajib pajak daerah di Kota Jayapura. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Bapenda Kota Jayapura merupakan perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan pajak restoran dan berperan langsung dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih satu bulan, yaitu pada bulan Januari 2026, melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Jangka waktu tersebut dianggap memadai untuk memperoleh data yang akurat mengenai efektivitas pengelolaan pajak restoran, faktor-faktor yang menjadi hambatan, serta upaya kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi stagnasi kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Jayapura.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Pengelolaan Pajak Restoran dalam Meningkatkan PAD Kota Jayapura

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pajak restoran di Kota Jayapura secara administratif telah berjalan cukup efektif.

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Pajak Keseluruhan Kota Jayapura dari tahun 2020-2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2020	Rp.130.018.313.571	Rp.150.838.056.899	116,01%
2021	Rp.215.050.843.525	Rp.229.742.421.490	106,83%
2022	Rp.250.534.244.707	Rp.297.105.436.199	118,59%
2023	Rp.260.624.398.892	Rp.260.836.177.390	100,08%
2024	Rp.267.212.271.377	Rp.269.651.840.029	100,91%

Sumber : Bapenda Kota Jayapura, diolah oleh penulis, 2025

Pada **Tabel 1** terlihat dari realisasi penerimaan pajak restoran yang setiap tahun mampu mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak restoran mencapai Rp31,7 miliar atau sebesar 117,25% dari target. Tahun 2021 hingga 2023 realisasi penerimaan pajak restoran mampu mencapai 100% target penerimaan daerah. Sementara pada tahun 2024 realisasi penerimaan pajak restoran meningkat menjadi Rp57,8 miliar dengan persentase capaian sebesar 165,39%.

Berdasarkan dimensi pencapaian tujuan menurut (Steers, 2008), pemerintah daerah telah berhasil mencapai target penerimaan pajak restoran secara administratif. Namun demikian, efektivitas tersebut belum sepenuhnya tercermin pada peningkatan kontribusi pajak restoran terhadap PAD karena kontribusi pajak restoran masih stagnan pada kisaran ±21% selama lima tahun terakhir. Pada dimensi integrasi, pemerintah daerah telah melakukan koordinasi dan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak restoran. Selain itu, pemerintah daerah juga telah menerapkan sistem pembayaran pajak berbasis digital untuk mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak daerah. Sementara pada dimensi adaptasi, pemerintah daerah mulai menyesuaikan sistem pengelolaan pajak dengan perkembangan teknologi melalui penggunaan alat monitoring transaksi dan sistem pelaporan berbasis digital. Namun, implementasi teknologi tersebut belum berjalan optimal karena masih terdapat keterbatasan pengawasan dan pemanfaatan data digital.

3.2 Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Pajak Restoran

Penelitian menemukan beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam optimalisasi kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Jayapura. Pertama, belum optimalnya pengawasan terhadap wajib pajak restoran. Pemerintah daerah masih mengalami keterbatasan dalam melakukan pengawasan langsung terhadap pelaporan omzet usaha restoran/café. Kedua, rendahnya akurasi data wajib pajak restoran. Masih ditemukan usaha café yang belum terdata secara optimal sehingga berpotensi mengurangi penerimaan pajak daerah. Ketiga, keterbatasan pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan pajak restoran. Meskipun pemerintah daerah telah menggunakan sistem digitalisasi pajak, implementasinya belum menyeluruh dan masih menghadapi kendala teknis. Keempat, masih adanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaporkan omzet usaha secara jujur dan transparan. Kondisi ini menyebabkan potensi penerimaan pajak restoran belum dapat dimaksimalkan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Hanifa dan Irawan (2022) yang menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan pajak daerah dipengaruhi oleh kualitas pengawasan dan administrasi perpajakan. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Lulu Lovianna dan Notika Rahmi (2021) yang menegaskan pentingnya akurasi data wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan daerah. Pada konteks internasional, hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Mascagni (2018) dan Alm et al. (2016)

yang menyatakan bahwa efektivitas administrasi perpajakan dan kualitas pengawasan merupakan faktor utama dalam optimalisasi penerimaan pajak.

3.3 Upaya Kebijakan yang Diperlukan

Untuk meningkatkan kontribusi pajak restoran terhadap PAD secara lebih signifikan, pemerintah daerah perlu melakukan beberapa upaya kebijakan. Pertama, memperkuat sistem pengawasan berbasis digital melalui optimalisasi penggunaan alat monitoring transaksi usaha restoran/café. Kedua, meningkatkan koordinasi antarinstansi dalam melakukan pendataan dan pengawasan wajib pajak restoran. Ketiga, melakukan pendataan ulang wajib pajak secara berkala agar seluruh usaha restoran/café dapat terdata secara optimal. Keempat, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola pajak daerah melalui pelatihan dan penguatan kompetensi di bidang perpajakan digital. Kelima, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi dan edukasi perpajakan yang berkelanjutan. Upaya peningkatan kualitas pengelolaan pajak restoran melalui digitalisasi, penguatan pengawasan, dan peningkatan kapasitas aparatur sejalan dengan konsep pengelolaan keuangan daerah yang dikemukakan Akbar (2013b). Selain itu, strategi penguatan kelembagaan dan pelayanan perpajakan juga telah terbukti efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah sebagaimana ditunjukkan oleh Maabuat et al. (2022) serta Ryan Al Rachmat (2023).

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan pajak restoran di Kota Jayapura telah berjalan efektif secara administratif karena realisasi penerimaan pajak restoran mampu mencapai bahkan melampaui target penerimaan daerah selama periode 2020–2024. Namun demikian, efektivitas tersebut belum optimal dalam meningkatkan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD masih stagnan pada kisaran ±21% meskipun jumlah usaha café terus meningkat dan tingkat kepatuhan pajak tergolong tinggi. Faktor penghambat yang ditemukan meliputi belum optimalnya pengawasan, rendahnya akurasi data wajib pajak, keterbatasan pemanfaatan teknologi digital, serta masih adanya ketidakpatuhan dalam pelaporan omzet usaha. Temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa efektivitas pengelolaan pajak tidak hanya diukur dari pencapaian target penerimaan, tetapi juga dari kemampuan meningkatkan kontribusi pajak terhadap kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan (Steers, 1985; Torgler, 2007). Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan pengelolaan pajak restoran melalui sistem pengawasan berbasis digital, peningkatan koordinasi antarinstansi, pendataan ulang wajib pajak secara berkala, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna mengoptimalkan kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Jayapura secara berkelanjutan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura beserta seluruh jajaran yang telah memberikan kesempatan dan dukungan selama pelaksanaan penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para pelaku usaha restoran/café sebagai informan penelitian, Dosen Pembimbing, serta seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung terselenggaranya penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Abdullatif, F., Tui, F. P. D., & Nani, Y. N. (2025). Pengelolaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Gorontalo (Studi kasus pajak daerah di Kabupaten Gorontalo). *Sosiologi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2*(4), 251–258. http://ejurnal.fis.ung.ac.id/index.php/sjppm/about

Achmad Lutfi. (2021). Penerimaan pendapatan pajak daerah di DIY 1997–2015. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan, 8*(1), 45–58. https://www.researchgate.net/publication/352860752_Penerimaan_Pendapatan_Pajak_Daerah_di_Daerah_KabupatenKota_se_Daerah_Istimewa_Yogyakarta_1997-2015

Akbar, B. (2013a). *Akuntansi pemerintahan*. CV. Bumi Metro Raya. https://www.researchgate.net/publication/365365503_Akuntansi_Pemerintahan

Akbar, B. (2013b). *Manajemen keuangan di pemerintahan daerah: Suatu konsep dalam pengelolaan keuangan daerah*. Bumi Metro Jaya. https://perpustakaan.pom.go.id/slims/index.php?p=show_detail&id=4336

Alm, J., Martinez-Vazquez, J., & McClellan, C. (2016). Corruption and firm tax evasion. *Journal of Economic Behavior & Organization, 124*, 146–163. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2015.10.006

Alm, J., & Torgler, B. (2011). Do ethics matter? Tax compliance and morality. *Journal of Business Ethics, 101*(4), 635–651. https://doi.org/10.1007/s10551-011-0761-9

Ardieansyah, Asmungi, & Latip. (2023). *Metodologi penelitian sosial*. Deepublish. https://books.google.co.id/books/about/Metodologi_Penelitian_Sosial.html?id=nSsbEQAAQBAJ&redir_esc=y

Hanifa, & Irawan, A. (2022). Pengaruh pajak daerah dan retribusi terhadap PAD Kota Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal, 2*(2), 15–26. https://doi.org/10.35313/iarj.v2i2.3371

Lisi, G. (2015). Tax morale, tax compliance and the optimal tax policy. *Economic Analysis and Policy, 45*, 27–32. https://doi.org/10.1016/j.eap.2014.12.004

Lulu Lovianna, & Notika Rahmi. (2021). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber PAD (Jakarta). *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI), 3*(2), 112–122. https://www.researchgate.net/publication/367691346_Analisis_Efektivitas_Dan_Kontribusi_Pajak_Daerah_Sebagai_Sumber_Pendapatan_Asli_Daerah_Studi_Pada_Bapenda_Dki_Jakarta_Tahun_2016-2020

Maabuat, E. E., Sutiyo, & Kurniawati, L. (2022). Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa, 7*(2), 133–144. https://ejournal.ipdn.ac.id/khatulistiwa/article/view/2890

Mascagni, G. (2018). From the lab to the field: A review of tax experiments. *Journal of Economic Surveys, 32*(2), 273–301. https://doi.org/10.1111/joes.12201

Mochammad Miftachul Huda, et al. (2025). Analisis efektivitas pemungutan pajak daerah di

Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi & Pajak, 2*(2), 55–68. https://doi.org/10.61132/jieap.v2i2.1186

Nooraini, A., & Syarifudin, A. Y. (2018). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu, Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ekonomi & Keuangan Publik, 5*(2), 89–104. https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/416

Ryan Al Rachmat. (2023). Kontribusi pajak dan retribusi lokal di Pagar Alam. *Jurnal Ratri, 4*(1), 34–45. https://ejournal.univ-tridinanti.ac.id/index.php/ratri/article/view/734

Steers, R. M. (1985). *Organizational effectiveness: A behavioral view*. Goodyear Publishing Company.

Tappi, V. P. (2021). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jayapura. *Jurnal Ekonomi & Bisnis, 12*(1), 16–24. https://ejurnal.stie-portnumbay.ac.id/index.php/jeb/article/view/190

Torgler, B. (2007). *Tax compliance and tax morale: A theoretical and empirical analysis*. Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781847207203